



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSENSUS INFORMASI PUBLIK**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DPMPTSP
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
MHSOKH HUURA, SE
NIP.197004072005011008

DPMPTSP
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
MHSOKH HUURA, SE
NIP.197004072005011008

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik
- 3 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010)
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 10 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 11 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendeklarasi Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterkaitan

Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah

Kualifikasi Pelaksana	
1	Minimal SMU/Sederajat
2	Menguasai Tata Pembukuan
3	Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima
Peralatan/Perlengkapan	
1	Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2	Komputer
3	Jaringan Internet
4	Printer
5	Alat Tulis Kantor
Pencatatan dan Pendataan	
1	Dalam mengajukan permohonan informasi publik, Permohonan Informasi dengan dilampiri fotocopy identitas yang bersangkutan
2	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Peringatan

- 1 Apabila prosedur ini ada yang terlewatkhan maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
- 2 Apabila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
- 3 Apabila prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif

DIAGRAM ALIR

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI								
No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung		
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas Permohonan informasi/dokumen dari permohonan informasi	Setiap Saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang bermaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU kepatuhan dan kepentingan umum					Dasar Hukum:UU No.14 Tahun 2008 dan PERKI I Tahun 2017	Pada hari dan Jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Menyerahkan infomasi/dokumen yang dimaksud, jika status informasi/dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi/Dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan Jam kerja, maksimal 10 hari kerja sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita Acara pengujian konsekuensi
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia					Informasi atau dokumen yang diminta oleh permohonan informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



		Nomor SOP : 000.8.11.08 /DPMPTSP Tanggal Pembuatan : 04 Januari 2023 Tanggal Pengsaahan : 04 Januari 2023 Disahkan Oleh : Kepala DPMPTSP
		DPMPTSP KEPULAUAN MENTAWAI NIP. 197004072005011008 Kepala DPMPTSP
		Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik		Minimal SMU/Sederajat
3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)		
4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah		
6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010)		
7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Keterikatan		Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Masuk SOP Surat Keluar		1 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2 Komputer 3 Pedoman/Kerangka Acuan Kerja 4 Jaringan Internet 5 Printer 6 Alat Tulis Kantor
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1 Apabila prosedur ini ada yang terlewatkhan maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan baik 2 Apabila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3 Apabila prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif		1 Dalam mengajukan permohonan informasi publik, permohonan pelayanan informasi publik harus mengisi formulir dengan dilampiri fotocopy identitas yang bersangkutan 2 Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

DIAGRAM ALIR

SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana					Pendukung		
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	PPID Pembantu	Unit Kerja/OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	<p>Pemohon menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) (2) melalui surel atau surat elektronik dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di Website (3) melalui aplikasi e-PPID dengan mengisi formulir permohonan informasi secara lengkap disertai dengan foto identitas diri (KTP/SIM/Paspor) 					(1) Formulir Permohonan Informasi (2) Identitas Pemohon	1 Hari	Daftar Permohonan Informasi dalam register e-PPID dengan status "baru"	
2	Meneliti Kelengkapan Formulir dan Identitas	TIDAK				Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor			
3	Menginput ke dalam aplikasi e-PPID apabila permohonan informasi disampaikan secara tertulis dan email					Nomor Register Permohonan Informasi		(1) Daftar Permohonan Informasi dalam register e-PPID dengan status "baru" (2) Tanda bukti permohonan informasi informasi yang terkirim ke nomor ponsel dan surel	Otomatis oleh Sistem Informasi e-PPID
4	Mencetak formulir yang telah diisi dari e-PPID							(1) Formulir permohonan Informasi yang telah bermotor (2) Salinan Identitas Pemohon	
5	Mengubah status permohonan dalam e-PPID menjadi diproses							Status Permohonan dalam e-PPID berubah menjadi "diproses"	

6	Memeriksa Ketersediaan informasi / dokumen yang diminta					1. Daftar Informasi Publik 2. Daftar Informasi yang dikecualikan	1 Hari		
7	Memutuskan Permohonan diproses atau ditolak secara tertulis						10 Hari Kerja + Perpanjangan Waktu 7 Hari Kerja dengan Pemberitahuan tertulis	(1) Jawaban tertulis PPID Pembantu yang berisi persetujuan/penolakan (2) Salinan dokumen / informasi yang diminta pemohon apabila permohonan disetujui	
8	Memproses jawaban permohonan melalui e-PPID							(1) Jawaban dan informasi yang diminta terkirim ke pemohon dari (2) Status permohonan informasi dalam e-PPID menjadi "disetujui"	
9	Menerima Informasi, surat pemberitahuan tertulis, SK Penolakan Permohonan								
10	Pemohon Informasi mengambil/mendapatkan informasi sesuai dengan permohonan (apabila Permohonan disetujui)								

KEPALA DINAS
SELAKU

ATASAN PPID PEMBANTU DPMPTSP
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK dan DOKUMENTASI PUBLIK**

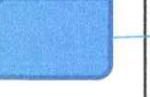


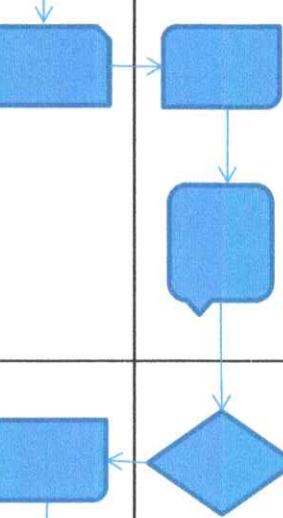
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

<p>Nomor SOP : 000.01.11 / O4 /DPMPTSP Tanggal Pembuatan : 04 Januari 2023 tanggal Pengesahan : 04 Januari 2023 Disahkan Oleh :  MUSOKHI HURA, SE NIP.197704072005011008 Kepala DPMPTSP</p>	
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Dokumentasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<p>1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik</p> <p>3 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)</p> <p>4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</p> <p>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010)</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p> <p>Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendeklasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>1 Minimal SMU/Sederajat</p> <p>2 Memiliki kemampuan input data secara elektronik</p> <p>3 Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan informasi publik</p> <p>4 Mengetahui tugas dan fungsi prosedur penyusunan DIDP</p>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Penyusunan Data	<p>1 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</p> <p>2 Komputer</p> <p>3 Pedoman/Kerangka Acuan Kerja</p> <p>4 Jaringan Internet</p> <p>5 Printer</p> <p>6 Alat Tulis Kantor</p>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>Apabila prosedur ini ada yang terlewatkan maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik</p> <p>Apabila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai</p> <p>Apabila prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif</p>	<p>1 Dalam mengajukan permohonan informasi publik harus mengisi formulir dengan diampiri fotocopy identitas bersangkutan</p> <p>2 Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy</p>

DIAGRAM ALIR

SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik							
No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung		
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengirimkan Surat Edaran kepada PPID Pembantu untuk menyusun Draft DIDP di Unit masing-masing				Draft Surat Edaran	Hari dan Jam Kerja	1. Surat Edaran 2. Format Isian DIDP
2	Mengumpulkan Informasi dan Dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing Badan Publik, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam bentuk harcopy dan softcopy				(1) UU No.14 Tahun 2018 (2) UU No. 25 Tahun 2009 (3) PP 61 Tahun 2010	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
3	PPID Pembantu Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi untuk diserahkan ke PPID Utama				(1) UU No.14 Tahun 2018 (2) UU No. 25 Tahun 2009 (3) PP 61 Tahun 2010	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya

4	PPIP Utama Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsipkan dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat. perlu dibuat daftar Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan untuk dikonsultasikan dengan atasan PPIP sebelum ditetapkan			Alat Tulis Kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Dokumentasi Publik (DIDP)	
5	Menetapkan DIDP secara resmi, atasan PPIP memerintahkan PPIP Utama dan PPIP Pembantu untuk menyimpan dan mengumumkan kepada masyarakat			Mengadakan Rapat bersama dengan PPIP Utama dan PPIP Pembantu untuk menetapkan DIP	Setelah terkumpul dari PPIP Pembantu	DIDP Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPIP	Setelah DDIP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
6	Mengunggah DIDP ke Website resmi PPIP Utama Pemerintahan Daerah maupun			Website dan Sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh Badan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Setelah ditetapkan oleh Atasan PPIP	DIDP Adanya konten DIDP di Website Resmi PPIP Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Disahkan Oleh

Kepala DPMPTSP

MOTISOKHI HURA, SE

NIP.19700407200511008

Tanggal Pengsaahan

04 Januari 2023

Tanggal Pembuatan

04 Januari 2023

Nomor SOP

:No. 0.2.3 / 01

/DPMPTSP

Disahkan Oleh

Kepala DPMPTSP

MOTISOKHI HURA, SE

NIP.19700407200511008

Tanggal Pengsaahan

04 Januari 2023

Tanggal Pembuatan

04 Januari 2023

Nomor SOP

:No. 0.2.3 / 01

/DPMPTSP

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik
- 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010)
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 11 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 12 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendeklarasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterkaitan

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Penyusunan Data

Peralatan/Perlengkapan

- 1 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
- 2 Komputer
- 3 Pedoman/Kerangka Acuan Kerja
- 4 Jaringan Internet
- 5 Printer
- 6 Alat Tulis Kantor

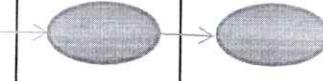
Peringatan

- 1 Apabila prosedur ini ada yang terlewatkhan maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
- 2 Apabila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
- 3 Apabila prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif

Pencatatan dan Pendataan

- 1 Dalam mengajukan permohonan informasi publik, permohonan pelayanan formulir dengan dilampiri fotocopy identitas yang bersangkutan
- 2 Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

DIAGRAM ALIR

No	Kegiatan	SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik							
		Pelaksana				Pendukung			
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	<p>Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlaksananya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui:</p> <p>(1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi photocopy identitas diri (NIK)</p> <p>(2) Melalui Website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website</p> <p>(3) Mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID</p>					<ul style="list-style-type: none"> (1) Formulir Pengajuan Keberatan informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh (2) Photocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan 	Hari dan Jam Kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri photocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Hari dan Jam Kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di-file dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Hari dan Jam Kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	

4	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi				(1) Berkas Pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap (2) DIP yang telah diumumkan	Hari dan Jam Kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi				Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID Pembantu Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Hari dan Jam Kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan kepada pemohon informasi	

KEPALA DINAS
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU DPMPTSP
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DPMPTSP
MOTISOKHI HURA, SE

Nomor SOP : 000.4.73 / 10 /DPMPTSP

Tanggal Pembuatan : 04 Januari 2023

Tanggal Pengsahan : 04 Januari 2023

Disahkan Oleh

DPMPTSP
MOTISOKHI HURA, SE
NIP.197004072005011008
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
KEPUI A Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Dikti.
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik
- 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010)
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 11 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 12 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendeklarasi Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterkaitan

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Penyusunan Data

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Minimal SMU/Sederajat
- 2 Memiliki kemampuan input data secara elektronik
- 3 Mengetahui tugas dan fungsi prosedur penyusunan DIP

Peringatan

- 1 Apabila prosedur ini ada yang terlewatkhan maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
- 2 Apabila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
- 3 Apabila prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif

Peralatan/Perlengkapan

- 1 Surat Permohonan dan Disposisi
- 2 Komputer
- 3 Formulir-Formulir
- 4 Media Komunikasi
- 5 Komputer
- 6 Alat Tulis Kantor

Pengataan dan Pendataan

- 1 Dalam mengajukan permohonan informasi publik, permohonan pelayanan informasi publik harus mengisi formulir dengan dilampiri fotocopy identitas yang bersangkutan
- 2 Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

DIAGRAM ALIR

No	Kegiatan	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik					Pendukung		
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi. Dan diberikan perpanjangan pemenuhan selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Mulai				(1) Formulir pengajuan keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau di Website dapat diunduh (2) Fotocopy atau scan identitas pemohon keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 hari sejak permohonan keberatan terregistrasi	berkas permohonan keberatan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan KTP (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian			↓				Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan		↓				Diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID		
4	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID			↓					
5	Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada komisi informasi Provinsi apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi				↓	Selesai			





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN DATA**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor SOP	:000.0.1.3 / 06	/DPMPTSP
Tanggal Pembuatan	:04	Januari 2023
Tanggal Pengsahaman	:04	Januari 2023
Disahkan Oleh	:	Kepala DPMPTSP

DPMPTSP KEPULAUAN MENTAWAI
NIP. 194604072005011008



Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	Peralatan/Perlengkapan	Penerapan dan Pendataan
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Administrator mendapat Surat Tugas dari Pimpinan 2 Memiliki kemampuan input data secara elektronik 3 Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan, pengamanan terhadap data dan informasi yang dikelola 4 terhadap data dan informasi yang dikelola		
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik			
3	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)			
4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota			
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah			
7	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010)			
9	Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
10	Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
11				
12				
Keterkaitan	Perilaku dan Penyalahgunaan Pelayanan Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan	Penerapan dan Pendataan	
	Penyalahgunaan Pelayanan Informasi Publik Penyusunan Data	1 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2 Komputer 3 Pedoman/Kerangka Acuan Kerja 4 Jaringan Internet 5 Printer 6 Alat Tulis Kantor	1 Dalam mengajukan permohonan 2 Permohonan Pelayanan 3 Formulir dengan dilampiri fotocopy identitas yang bersangkutan 4 Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	
Peringatan	Apabila prosedur ini ada yang terlewatkhan maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik			
1	Apabila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai			
2	Apabila prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif			

DIAGRAM ALIR

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
		Administrator Server	Pengelola Teknologi Informasi	Pejabat Pengawas/Kasi Pengelolaan Data	Pejabat Administrator	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Penyampaian untuk melakukan pendataan yang berkaitan dengan data sektoral				(Oval)	Nota Dinas	Pada hari dan Jam kerja	Nota Dinas	
2	Membuat surat untuk melakukan pendataan atau menerima untuk pengolahan data			(Parallelogram)		Nota Dinas	Pada hari dan Jam kerja	Surat Pendataan	
3	Menerima data untuk dikelola disimpan atau diupdate		(Parallelogram)			Surat pendataan dan data	Pada hari dan Jam kerja	Data Sektoral	
4	Menindaklanjuti untuk pengelolaan data harus disimpan atau dilakukan recovery data	(Parallelogram)				Data sektoral	Pada hari dan Jam kerja	Catatan Program penyimpanan data, recovery dan update data	
5	Membuat Laporan Penyelesaian Pengelolaan Data		(Parallelogram)			Catatan program penyimpanan data, recovery, update data	Pada hari dan Jam kerja	Laporan Pengelolaan Data	
6	Melakukan pengecekan pengelolaan data telah selesai atau belum selesai	Tidak	(Diamond)	Ya		Laporan Pengelolaan Data	Pada hari dan Jam kerja	Perbaikan Laporan Pengelolaan Data	
7	Melakukan pengecekan pengelolaan data jika telah selesai maka membuat laporan jika belum maka dikembalikan kepada pengawas untuk			Tidak	(Diamond)	Laporan penyelesaian data	Pada hari dan Jam kerja	Laporan Penyelesaian Data	
8	Menyelesaikan laporan pengelolaan data akhir		(Parallelogram)			Laporan penyelesaian data	Pada hari dan Jam kerja	Konsep Laporan Akhir Penyelesaian pekerjaan	
9	Menyampaikan kepada pengola data	(Oval)				Konsep laporan akhir penyelesaian pekerjaan	Pada hari dan Jam kerja	Laporan Akhir Penyelesaian pekerjaan	

KEPALA DINAS
SELAKU

ATASAN PPID PEMBANTU DPMPTSP
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



MOTISOKHI HURA, SE
NIP.197004072005011008



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDOKUMENTASIAN DATA DAN INFORMASI**

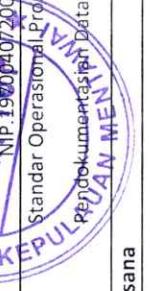
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Nomor SOP : <u>005.0.233/ 05 /DPMPTSP</u> Tanggal Pembuatan : <u>04 Januari 2023</u> Tanggal Pengesahan : <u>04 Januari 2023</u> Disahkan Oleh : <u>Kepala DPMPTSP</u>
		 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DPMPTSP NIP 197007072005011008</p>
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Republik Indonesia Data dan Informasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071) 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010) 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 10 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Minimal SMU/Sederajat 2 Memiliki kemampuan input data secara elektronik 3 Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan informasi publik 4 Mengetahui tugas dan fungsi prosedur penyusunan DIPD	
Keterkaitan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Penyusunan Data	Peralatan/Perlengkapan	
	1 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2 Komputer 3 Pedoman/Kerangka Acuan Kerja 4 Jaringan Internet 5 Printer 6 Alat Tulis Kantor	
Peringatan Apabila prosedur ini ada yang terlewatkhan maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2 Apabila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3 Apabila prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	Pencatatan dan Pendataan	
	1 Dalam mengajukan permohonan permohonan Pelayanan formulir dengan dilampiri fotocopy bersangkutan 2 Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

DIAGRAM ALIR

No	Kegiatan	SOP Pendokumentasian Data dan Informasi				Pendukung		
		Atasan PPID	Pelaksana	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima Ringkasan Informasi Publik dari unit terkait yang telah dikategorikan menurut kegiatan/substansi, memberikan arahan kepada PPID Bidang Dokumentasi dan Informasi Publik	Mulai			Ringkasan Informasi Publik	Satu Hari	Arahan	
2	Memberikan instruksi kepada PPID pengolahan data untuk memverifikasi Informasi sesuai kegiatan, serta melakukan autentifikasi informasi tersebut				Arahan, Ringkasan Informasi Publik	Satu Hari	Arahan, Ringkasan Informasi Publik	
3	Melakukan Verifikasi informasi sesuai kegiatan, serta melakukan autentifikasi melalui validasi informasi tersebut setiap unit kerja, selanjutnya melaporkan dan meminta arahan kepada PPID Bidang Dokumentasi				Arahan, Ringkasan Informasi Publik	Satu Hari	Laporan, Ringkasan Informasi Publik	
4	Mengintruksikan PPID pengolahan data untuk melakukan verifikasi dan autentifikasi ulang terhadap informasi tersebut				Arahan, Ringkasan Informasi Publik	Satu Hari	Arahan, Ringkasan Informasi Publik	
5	Mendokumentasikan Informasi tersebut dengan memberi kode informasi untuk mempermudah pencarian informasi, serta melaporkan kepada atasan PPID			Selesai	Arahan, Ringkasan Informasi Publik	Satu Hari	Laporan, terdokumentasi Informasi Publik	

KEPALA DINAS

SELAKU

ATASAN PPID PEMBANTU DPMPTSP
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor SOP	: 000.8.25 / 07 /DPMPTSP
Tanggal Pembuatan	: 04 Januari 2023
tanggal Pengsahan	: 04 Januari 2023
Disahkan Oleh	Kepala DPMPTSP
Nama SOP	MOTISOKHI HURA, SE NIP.19700407200511008 Standar Operasional Prosedur Tenaga Teknis PPID Pejabat Pengelola Informasi Doukumentasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik
- 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasinal Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010)
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 11 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 12 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendeklasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1 Memiliki kemampuan pengolahan Data
- 2 Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- 4 Mengetahui Tugas dan Fungsi dalam Pembuatan Laporan Kinerja

Keterkaitan

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Penyusunan Data

Peralatan/Perlengkapan

- 1 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
- 2 Komputer
- 3 Pedoman/Kerangka Acuan Kerja
- 4 Jaringan Internet
- 5 Printer
- 6 Alat Tulis Kantor

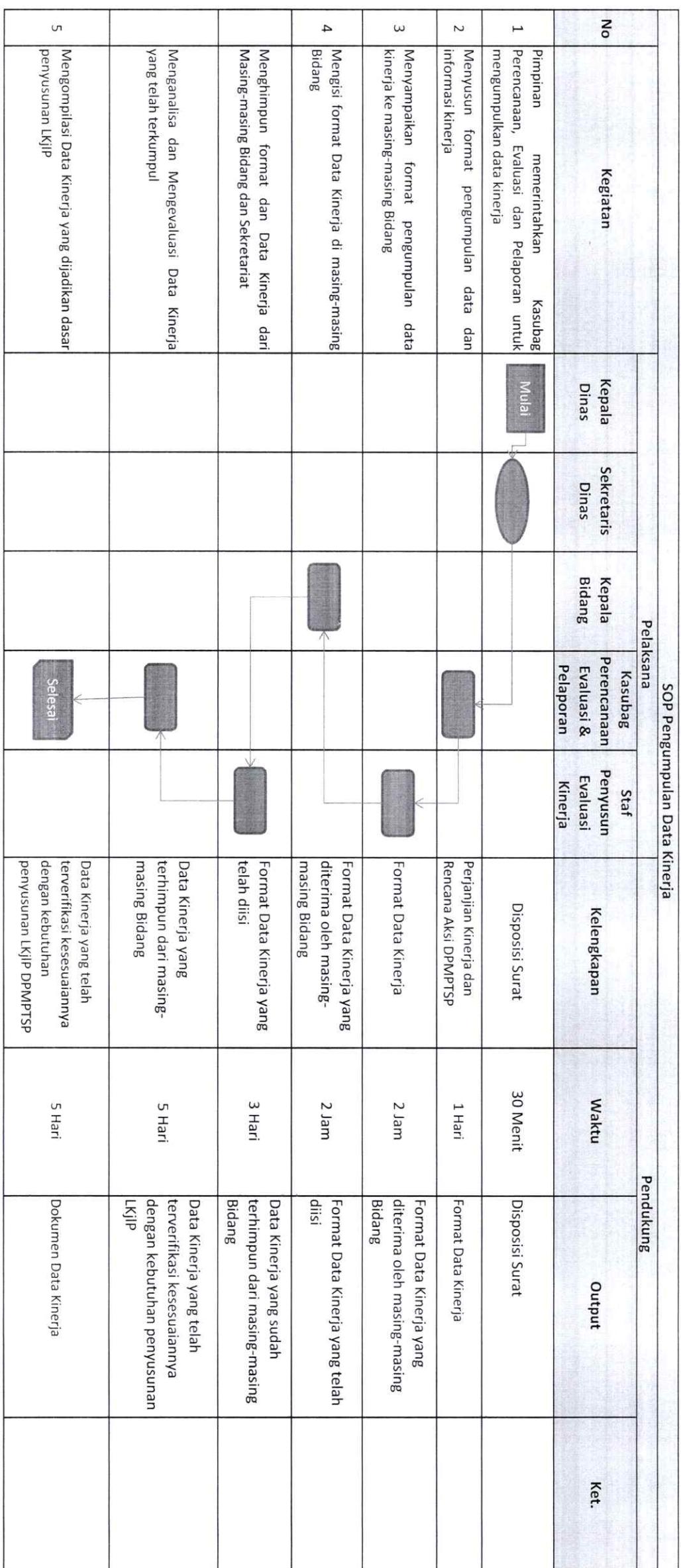
Peringatan

- 1 Apabila prosedur ini ada yang terlewatkhan maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
- 2 Apabila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
- 3 Apabila prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif

Pencatatan dan Pendataan

- 1 Dalam mengajukan permohonan Informasi Publik, Permohonan Pelayanan Informasi publik harus mengisi formulir dengan dilampiri photocopy identitas yang bersangkutan
- 2 Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

DIAGRAM ALIR



KEPALA DINAS

ATASAN PPD PEMBANTU DPMPTSP
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

* DPMPTSP *

MONTSOKHI HURA, SE

NRP.197004072005011008

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TENAGA TEKNIS PPID PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

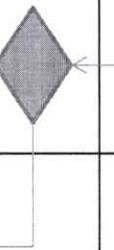
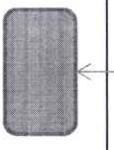
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor SOP	: 000.84/02 /DPMPTSP
Tanggal Pembuatan	: 04 Januari 2023
tanggal Pengsaian	: 04 Januari 2023
Disahkan Oleh	: Kepala DPMPTSP
Nama SOP	: Standar Operasional Prosedur Tenaga Teknis PPID Pejabat Pengelola Informasi Doukumentasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071) 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasinal Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010) 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Memiliki kemampuan pengolahan Data 2 Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 4 Mengetahui Tugas dan Fungsi dalam Pembuatan Laporan Kinerja
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Penyusunan Data	1 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2 Komputer 3 Pedoman/Kerangka Acuan Kerja 4 Jaringan Internet 5 Printer 6 Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Apabila prosedur ini ada yang terlewatkhan maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2 Apabila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3 Apabila prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1 Dalam mengajukan permohonan Informasi Publik, Permohonan Pelayanan Informasi publik harus mengisi formulir dengan dilampiri fotocopy identitas yang bersangkutan 2 Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

DIAGRAM ALIR

No	Kegiatan	SOP Tenaga Teknis PPID Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi			Pendukung		
		Seluruh Pejabat/Staf OPD	PPID Utama Pelaksana	Administrator Website PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menggumpulkan informasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing OPD baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim kepada pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, dan bentuk informasi yang tersedia (misalnya dalam bentuk hard copy atau soft copy) dsb. Format pengisian dalam bentuk informasi di masing-masing OPD baca buku panduan pembentukan dan operasional PPID Pemerintah provinsi dan Kabupaten/ Kota			Buku panduan pembentukan dan operasional PPID pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 kali setahun	Datar Informasi Publik yang telah di verifikasi kebenarannya oleh kepala SKPD yang bersangkutan	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi yang dikumpulkan dan mengidentifikasi berdasarkan sifat informasi, selain itu juga mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan dengan kategori informasi sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU no.14 tahun 2008 pasal 17 dan pasal 18 secara ketat, terbatas, dan tidak mutlak, informasi yang dikecualikan ini harus ditetapkan melalui Uji Konsekuensi dan Uji Kepentingan Publik (diatur dalam SOP sendiri)		Buku panduan pembentukan dan operasional PPID Pemerintah Kabupaten Bogor	2 kali setahun	Daftar Informasi Publik yang telah di verifikasi, Klasifikasinya oleh Kepala OPD yang bersangkutan	Klasifikasi Informasi terdiri atas : Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan	

	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk file khusus (Softcopy) dan tempat penyimpanan dokumen untuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi wajib, serta merta, dan berkala, informasi yang dikecualikan paling tidak hanya daftarnya saja yang perlu dibuat		Buku khusus dan komputer/ hardcopy khusus yang memuat dokumentasi informasi	2 kali setahun	Dokumen informasi publik	Staf kearsipan/ dokumentasi mempunyai buku khusus dokumentasi dan semua dokumentasi data juga tercatat dalam bentuk softcopy
3	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi dan memerintahkan untuk mengumumkan DIP kepada masyarakat.		PPID Utama dan PPID Pelaksana melakukan rapat bersama untuk menetapkan Daftar Informasi Publik.	2 kali setahun	Daftar Informasi Publik yang mutakhir	
4	Meng -Upload DIP ke website khusus PPID atau website pemerintah daerah maupun melalui sarana pengumuman lainnya		Website dan sarana pengumuman lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.	2 kali setahun	Adanya konten Daftar Informasi Publik di website PPID atau website pemerintah daerah dan terpampangnya DIP di papan pengumuman setiap SKPD.	

KEPALA DINAS

SELAKU

ATASAN PPID PEMBANTU DPMPTSP
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

MOHSONI HURA, SE
NIP.197004072005011008



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PEJABAT PENGETAHUAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK



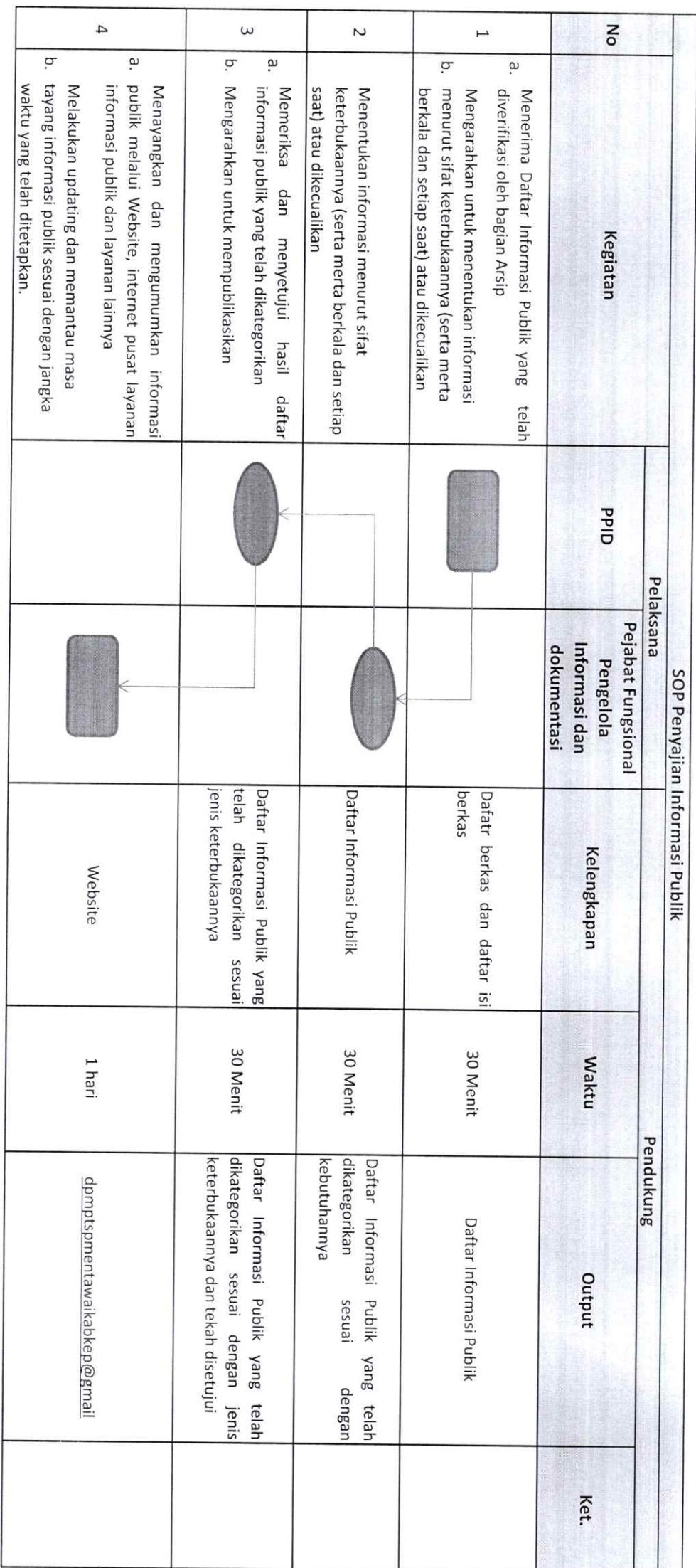
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Nomor SOP	: 000.0.7.7/ OG /DPMPTSP
Tanggal Pembuatan	: 04 Januari 2023
tanggal Pengsahan	: 04 Januari 2023
Disahkan Oleh	: Kepala DPMPTSP
	MOTISOKHI HURA, SE NIP.197004072005011008
Nama SOP	: Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071) 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010) 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 11 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Minimal SMU/Sederajat 2 Menguasai Tata Pembukuan 3 Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima
Keterkaitan	
Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah	Peralatan/Perlengkapan
	1 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2 Komputer 3 Jaringan Internet 4 Printer 5 Alat Tulis Kantor
Peringatan	
1 Apabila prosedur ini ada yang terlewatkhan maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2 Apabila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3 Apabila prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	Pencatatan dan Pendataan
	1 Dalam mengajukan permohonan Informasi Publik, Permohonan Informasi dengan dilampiri fotocopy identitas yang bersangkutan 2 Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

DIAGRAM ALIR



KEPALA DINAS

SELAKU

ATASAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DPMPTSP
MOTTSOKH HUBA, SE
NIP.1970040720050111008

